

Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Bunayyah¹⁾, Sri Kamariyah²⁾, Widyawati³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: bunayyahh@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektivitas pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi yang terjadi dalam suatu aspek efektivitas tertentu, sekaligus mendeskripsikan secara terperinci efektivitas tersebut melalui uraian dengan argumen yang jelas. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja aplikasi e-SIMBADA di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan aplikasi e-SIMBADA di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, serta sejauh mana prinsip pelayanan yang digunakan dalam aplikasi e-SIMBADA oleh Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Penelitian ini mendeskripsikan efektivitas pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang mengacu pada teori dari Richard M. Steers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas aplikasi (e-SIMBADA) dalam penyusunan laporan di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dapat dinyatakan cukup efektif, meskipun terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat dalam penerapan aplikasi (e-SIMBADA). Hal ini ditandai dengan terpenuhinya kriteria efektivitas penerapan aplikasi (e-SIMBADA) baik dari aspek keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, dan pencapaian tujuan secara menyeluruh. Faktor-faktor pendukung efektivitas penerapan aplikasi (e-SIMBADA) dalam penyusunan laporan di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik meliputi komunikasi yang baik, sumber daya manusia yang baik, sikap implementor, dan struktur birokrasi yang memadai. Sedangkan faktor-faktor penghambat efektivitas penerapan aplikasi (e-SIMBADA) dalam penyusunan laporan di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik meliputi kendala software dan jaringan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya komitmen pimpinan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemanfaatan Aplikasi, e-SIMBADA, Manajemen Barang

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of utilizing the Regional Goods Management Information System (e-SIMBADA) application at the Dukun Subdistrict Office in Gresik Regency and to identify the factors that hinder and support the effectiveness of utilizing the e-SIMBADA application at the Dukun Subdistrict Office in Gresik Regency. The method used in this study is descriptive qualitative research, which aims to understand the development of specific physical facilities or the frequency of occurrences in a certain aspect of effectiveness, while also describing in detail the effectiveness through clear arguments. The focus of this study is on the performance of the e-SIMBADA application at the Dukun Subdistrict Office in Gresik Regency, the factors that support and hinder the implementation of the e-SIMBADA application at the Dukun Subdistrict Office in Gresik Regency, and to what extent the service principles used in the e-SIMBADA application by the Dukun Subdistrict Office in Gresik Regency are applied. This study describes the effectiveness of utilizing the e-SIMBADA application at the Dukun Subdistrict Office in Gresik Regency based on Richard M. Steers' theory. The results of the study show that the effectiveness of the e-SIMBADA application in preparing reports at the Dukun Subdistrict Office in Gresik Regency can be considered quite effective, although there are several obstacles or hindering factors in the application of e-SIMBADA. This is indicated

by the fulfillment of effectiveness criteria for the application of e-SIMBADA in terms of program success, target success, satisfaction with the program, and overall achievement of objectives. Factors supporting the effectiveness of the e-SIMBADA application in preparing reports at the Dukun Subdistrict Office in Gresik Regency include good communication, competent human resources, the attitude of the implementers, and an adequate bureaucratic structure. Meanwhile, the hindering factors affecting the effectiveness of the e-SIMBADA application in preparing reports at the Dukun Subdistrict Office in Gresik Regency include software and network issues, inadequate facilities and infrastructure, a shortage of human resources, and a lack of leadership commitment.

Keywords: *Effectiveness, Utilization of Applications, e-SIMBADA, Goods Management*

A. LATAR BELAKANG

Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Sebagai contoh, aset bergerak yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap, yaitu lahan, bangunan, dan lain sebagainya. Dalam aspek yang lain, aset pemerintah ini dapat berperan sebagai jaminan pembangunan di daerah. Sarana dan prasarana merupakan kelengkapan dan kemudahan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana ini akan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan apabila dikelola, dipelihara, dan dijaga dengan baik, serta digunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan dinas ataupun kepentingan dalam melayani masyarakat.

Aset memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat terstruktur, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian. Dari beberapa fungsi dalam pengelolaan aset daerah, pengamanan dan pemeliharaan merupakan fungsi yang penting.

Ditinjau dari sudut perkembangan teknologi di berbagai bidang yang saat ini sangat pesat, mau tidak mau harus ikut terlibat dalam memainkan peranan di berbagai bidang, khususnya pada penataan aset-aset atau barang di instansi masing-masing Pemerintahan Daerah. Di samping penggunaan teknologi untuk penataan

aset pemerintah, ditambah semakin meningkatnya volume dan jenis kegiatan kerja penyelenggaraan tugas-tugas dinas umum pemerintah, serta dalam rangka tertib administrasi, maka perlu dibuat suatu aturan dalam Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan penertiban administrasi dan juga penataan aset yang baik dalam struktur Pemerintahan Daerah, baik di tingkat Kabupaten maupun pada kantor Kecamatan. Aturan itu berguna untuk peningkatan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah agar berdaya dan berhasil guna dalam mendukung pembangunan di bidang tata Pemerintahan Daerah. Maka, perlu adanya suatu alat pendukung berupa teknologi informasi dalam pendukung kegiatan perkantoran.

Agar dapat mencapai tujuan dalam organisasi, maka sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dituntut dapat efektif dalam memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi yang, dengan memanfaatkan aplikasi dalam instansi pemerintah, memungkinkan pekerjaan akan jauh lebih mudah untuk dikerjakan. Sementara itu, efektivitas merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mewujudkan hasil kerja yang berkualitas.

Penggunaan teknologi informasi adalah untuk mempermudah segala urusan di instansi Pemerintahan Daerah sehingga pelaksanaan maupun pelayanan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tuntutan zaman. Penggunaan Sistem Informasi Barang Daerah pastinya membutuhkan wawasan yang mendalam tentang perancangan sistem informasi yang tepat dari pengguna dan kebutuhan untuk perbaikan secara

berkala untuk mencapai tujuan penggunaan aplikasi ini.

Sistem informasi ini dibuat untuk menggantikan sistem informasi manual yang telah berjalan sebelumnya, yang dianggap kurang efektif dan banyak kekurangannya. Maka, dengan sistem informasi yang dimodernisasi, kegiatan akan lebih produktif, namun tidak akan mengurangi kelangsungan sistem informasi yang ada. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh instansi pemerintah Kabupaten Gresik dengan mendesain teknologi informasi berbasis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.

Sistem ini memberikan banyak kemudahan dibandingkan sistem manual, seperti memudahkan pembuatan laporan rutin data persediaan, memudahkan pelacakan bukti proses persediaan, mampu menyajikan data sebagai bahan dalam pembuatan perencanaan dan penganggaran, dan sebagainya. Perangkat lunak ini, selain sangat mudah dipelajari, juga bersifat kustomisasi yang berarti dapat disesuaikan dengan permintaan pemakai dan kebutuhan Pemerintah Kota/Daerah.

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak atau software dalam bentuk sistem informasi, di mana aplikasi perangkat lunak ini dalam bentuk sistem informasi manajemen dengan fungsi dan kegunaan utama untuk manajemen dan pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku tentang pengelolaan barang milik daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, aplikasi SIMBADA dikembangkan lagi menjadi aplikasi berbasis web, di mana untuk aksesnya tak lagi harus menginstal software aplikasi, melainkan dengan menggunakan koneksi internet. Aplikasi berbasis web dinilai lebih mudah karena pengguna hanya perlu koneksi internet saja untuk memakai

aplikasi tanpa perlu menginstal software. Pengembangan teknologi ini mengubah nama dari SIMBADA menjadi e-SIMBADA.

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) versi baru ini sudah terintegrasi dan dapat diintegrasikan untuk berbagi data dan informasi dengan Sistem Informasi Manajemen Penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Manajemen Anggaran Daerah, dan Sistem Informasi Akuntansi Daerah.

Aplikasi (e-SIMBADA) versi baru ini adalah sebagai Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah yang dirancang lebih efektif dan efisien dalam pengoperasionalannya, sehingga operator lebih mudah dalam melaksanakan tugas untuk mengelola secara sistematis barang dan aset daerah mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahan tanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, serta tuntutan ganti rugi. Dengan demikian, pemimpin dapat lebih mudah untuk mengevaluasi serta memonitoring pegawainya dalam melaksanakan tugas mengelola barang dan aset daerah. Keunggulan aplikasi e-SIMBADA versi baru ini lebih unggul dan efektif dibandingkan aplikasi versi SIMBADA sebelumnya, karena sudah lebih canggih dengan tampilan dan menggunakan fitur-fitur terbaru yang berbasis internet sehingga bisa dioperasikan di mana saja, kapan pun, dan di mana pun tanpa batas waktu. Aplikasi ini juga dapat dioperasikan menggunakan handphone berbasis Android, sehingga lebih dapat dirasakan dibandingkan versi sebelumnya.

Untuk masuk ke dalam e-SIMBADA, pengguna diharuskan login ke dalam sistem dengan cara klik pada tombol Login, dan e-SIMBADA akan menampilkan tampilan login yang harus Anda isikan dengan username dan password sesuai dengan masing-masing pengguna.

Penggunaan Sistem Informasi Barang Daerah pastinya membutuhkan wawasan yang mendalam tentang perancangan sistem informasi yang tepat dari pengguna dan kebutuhan untuk perbaikan secara berkala untuk mencapai tujuan

penggunaan aplikasi ini. Sistem informasi dibuat untuk menggantikan sistem informasi manual yang telah berjalan sebelumnya, dan dipercaya bahwa dengan sistem informasi yang dimodernisasi, kegiatan fungsional suatu asosiasi akan lebih produktif, namun tidak akan mengurangi kelangsungan sistem informasi yang ada.

Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan kerangka data administrasi yang handal. Selain itu, pemanfaatan aplikasi kerangka program akan membuat pekerjaan otoritas publik lebih sederhana dan lebih produktif. Informasi dan data akan diperkenalkan dengan lebih efisien dan pasti. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat dijadikan rekomendasi bagi Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk dapat mengetahui kemampuan pegawai dalam memanfaatkan aplikasi e-SIMBADA, sehingga mempermudah urusan pemerintah, khususnya yang ada di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, terutama dalam urusan terhadap pelaksanaan tugas dalam pengelolaan barang daerah.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang pasti dan prosedural sebagai perangkat penilaian terhadap aplikasi e-SIMBADA yang digunakan di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Terdapatnya masalah, terutama terkait fungsi aplikasi e-SIMBADA yang digunakan untuk mengelola barang daerah atau aset daerah yang berada di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Peneliti melihat masih banyaknya kekurangan karena berbasis web dan rawan dicuri datanya oleh hacker atau kemasukan virus. Maka, dibutuhkan adanya proteksi keamanan yang baik untuk perlindungan terhadap aplikasi e-SIMBADA ini.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk membahas dengan melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.”

B. LANDASAN TEORITIS

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973) dalam Leo Agustino (2021:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan.

Adapun dari Carl Friedrich (1969) dalam Leo Agustino (2021:7), yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan, terutama di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan, di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Bridgman dan Davis (2005) dalam Edi Suharto (2020:3), menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai *whatever government choose to do or not to do*. Artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn (1990) dalam Edi Suharto (2020:4), menyatakan bahwa

kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna “kebijakan” hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga atau PKK), dan lembaga-lembaga sukarela lainnya, juga memiliki kebijakan-kebijakan pula.

2. E-Government

E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah, seperti *Wide Area Networks* (WAN), internet, dan mobile computing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya.

Menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2019:13), *e-government* adalah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Kemudian menurut Depkominfo (Samodra Wibawa 2018:2), *e-government* didefinisikan sebagai pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah, di mana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia, yakni (go.id). Menurut Clay G. Westlatt (2016:2) dalam website, *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, serta fasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sedangkan dalam buku *E-Government In Action* (2018:3), *e-government* diuraikan sebagai suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan objektif

bersama (*shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. Oleh karena itu, visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari para *stakeholder* yang ada. Misalnya:

- a) Memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya.
- b) Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparan.
- c) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik.
- d) Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis.

Karena visi tersebut berasal “Dari, Oleh, dan Untuk” masyarakat atau komunitas tempat *e-government* tersebut diimplementasikan, maka masa depannya akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat. Sebagaimana dikemukakan di atas, *e-government* adalah upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa *e-government* merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintah secara efisien.

Ada hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian *e-government* di atas, yaitu:

- a) Penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai alat baru.
- b) Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif. Dalam penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas.

3. Manfaat E-Government

E-government, atau pemerintahan elektronik, merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Manfaat *e-government* sangat luas dan beragam, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Menurut Purnomo (2020:45), penerapan *e-government* memberikan berbagai keuntungan bagi pihak-pihak terkait. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan *e-government*:

a) Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Administrasi

Salah satu manfaat utama dari *e-government* adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan proses-proses administratif, seperti pengolahan data, pengajuan izin, dan pelayanan publik, dilakukan secara lebih cepat dan tanpa batasan ruang dan waktu. Hal ini mengurangi waktu tunggu, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan kelancaran pelayanan. Menurut Mardiana (2018:37), sistem digital memungkinkan administrasi publik dilakukan secara otomatis, sehingga lebih efisien.

b) Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan memanfaatkan teknologi digital, *e-government* mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Informasi tentang kebijakan, anggaran, dan program pemerintah dapat dengan mudah diakses oleh publik. Hal ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya negara digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Prasetyo (2019:52), transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengawasan kebijakan pemerintah.

c) Aksesibilitas Layanan Publik yang Lebih Baik

E-government memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik secara online, kapan saja dan di

mana saja. Layanan seperti pendaftaran kependudukan, perizinan, dan pembayaran pajak bisa dilakukan melalui platform digital tanpa perlu mengunjungi kantor pemerintah. Hal ini memudahkan masyarakat, terutama di daerah terpencil, untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Menurut Rizki (2021:28), peningkatan aksesibilitas ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan fisik atau infrastruktur.

d) Penghematan Biaya

Dengan mengurangi kebutuhan untuk berinteraksi tatap muka, penggunaan teknologi dalam pemerintahan dapat mengurangi biaya operasional, seperti biaya transportasi, konsumsi, dan pengeluaran untuk infrastruktur fisik. Selain itu, otomatisasi proses bisnis juga membantu mengurangi biaya yang terkait dengan kesalahan manual dan mempercepat penyelesaian tugas-tugas administratif. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Setiawan (2017:15), yang menyebutkan bahwa penghematan biaya administrasi sangat terasa dengan adanya penerapan *e-government*.

e) Peningkatan Kualitas Pelayanan

e-government memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menawarkan layanan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sistem yang berbasis teknologi memungkinkan pengolahan data yang lebih akurat dan *real-time*, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada publik. Menurut Pratama (2020:63), sistem *E e-government* memungkinkan pelayanan publik yang lebih efisien dan tepat sasaran.

f) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Salah satu manfaat penting *e-government* adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan. Melalui platform digital, pemerintah dapat melakukan konsultasi publik, mengumpulkan masukan dari masyarakat, dan menyelenggarakan *e-voting* atau *e-petition*. Hal ini membantu menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Menurut Rini (2019:74), peningkatan partisipasi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pemerintahan.

g) Peningkatan Keamanan dan Pengelolaan Data

Dengan implementasi sistem yang terintegrasi, *e-government* meningkatkan pengelolaan data yang lebih aman dan terstruktur. Sistem digital memungkinkan data disimpan dalam format yang lebih terorganisir dan terlindungi, mengurangi potensi penyalahgunaan atau kebocoran informasi yang sensitif. Hal ini, menurut Susanto (2020:80), membantu memastikan bahwa data yang dikelola pemerintah tetap aman dan dapat diakses hanya oleh pihak yang berwenang.

Secara keseluruhan, penerapan *e-government* membawa perubahan besar dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola administrasi publik. Manfaat-manfaat tersebut tidak hanya mendukung pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

4. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective*, artinya berhasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang dengan sasaran yang dituju. Pernyataan Richard M. Steers menegaskan bahwa efektivitas adalah tujuan akhir dari

suatu organisasi. Organisasi-organisasi yang rasional akan mengarahkan segala tindakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan oleh organisasi. Steers menambahkan bahwa cara terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga konsep yang saling berhubungan.

Menurut pendapat Richard M. Steers (dalam Nadia Azlin, 2013:18), beberapa ukuran efektivitas mengacu pada teori dari Richard M. Steers (1995:9), yang dikutip dalam penelitian karya Dicky Setiawan Nugroho (2020:20), dengan beberapa indikator meliputi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh.

Adapun syarat-syarat eksplisit mengenai efektivitas kerja menurut Richard M. Steers (1985:135) adalah:

- a) Setiap organisasi harus mampu membina dan mempertahankan sejumlah pekerja terampil.
- b) Organisasi harus mampu memiliki prestasi serta peranan yang dapat diandalkan dari para karyawannya.
- c) Organisasi yang efektif juga menuntut agar para karyawannya mengusahakan bentuk tingkah laku yang spontan dan inisiatif.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarnya. Dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Ravianto (2019:11), efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan dan sejauh mana orang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Artinya, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan

perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun kualitas, itu bisa dikatakan efektif. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dinilai dengan berbagai cara. Menurut Kurniawan (2020:109), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya.

Dari pengertian-pengertian berbagai ahli yang dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan dapat mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan oleh organisasi.

5. Ukuran Efektivitas

Efektivitas dalam suatu organisasi atau program sering kali diukur untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Ukuran efektivitas ini bersifat multidimensional, mengingat bahwa efektivitas tidak hanya dilihat dari satu sisi, tetapi dari berbagai aspek yang relevan dengan tujuan organisasi atau program. Beberapa ukuran efektivitas yang umum digunakan dalam penelitian dan pengelolaan program meliputi:

- a) **Keberhasilan Program:** Keberhasilan program adalah ukuran utama yang menunjukkan apakah tujuan atau sasaran program telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Ukuran ini berkaitan dengan seberapa banyak atau seberapa baik hasil yang dicapai oleh program tersebut, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas hasil yang diharapkan.
- b) **Keberhasilan Sasaran:** Sasaran dalam sebuah program atau kebijakan biasanya lebih spesifik dibandingkan tujuan umum. Keberhasilan sasaran mengukur sejauh mana program tersebut berhasil mencapai target-target yang telah ditentukan. Sasaran ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti penyelesaian tugas dalam batas waktu tertentu atau

tercapainya kriteria kualitas tertentu dalam pelaksanaan program.

- c) **Kepuasan Terhadap Program:** Kepuasan terhadap program menjadi ukuran yang penting dalam menilai efektivitas suatu kebijakan atau program, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Jika peserta atau pemangku kepentingan merasa puas dengan hasil yang didapat dari program, maka dapat disimpulkan bahwa program tersebut efektif. Kepuasan ini bisa diukur melalui survei atau wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam program.
- d) **Tingkat Input dan Output:** Mengukur efektivitas juga dapat dilakukan dengan menganalisis rasio antara input dan output dalam suatu program. Input mencakup semua sumber daya yang dikeluarkan, baik berupa tenaga kerja, biaya, maupun material, sedangkan output adalah hasil yang diperoleh dari pemanfaatan input tersebut. Semakin tinggi output yang dihasilkan dengan input yang relatif rendah, maka semakin efektif program tersebut.
- e) **Pencapaian Tujuan Menyeluruh:** Tujuan menyeluruh merupakan tujuan jangka panjang yang lebih luas yang ingin dicapai oleh suatu program atau organisasi. Efektivitas dapat diukur dengan melihat sejauh mana program tersebut berkontribusi pada pencapaian tujuan menyeluruh yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan ini biasanya melibatkan evaluasi dari berbagai perspektif dan aspek untuk mengetahui apakah hasil akhir sesuai dengan visi dan misi organisasi atau program tersebut.

Kesimpulannya, ukuran efektivitas sangat bergantung pada tujuan dan konteks program atau organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki indikator yang tepat dalam mengukur efektivitas agar hasil yang dicapai dapat dievaluasi secara objektif dan memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian suatu program atau kebijakan.

6. Pengertian Pemanfaatan Aplikasi

Pemanfaatan aplikasi dapat diartikan sebagai proses penggunaan aplikasi untuk mendukung berbagai aktivitas manusia, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Menurut Kadir (2018:3), aplikasi adalah program siap pakai yang dirancang untuk melaksanakan fungsi tertentu bagi pengguna, baik individu maupun organisasi, guna membantu menyelesaikan tugas-tugas secara lebih cepat dan akurat. Aplikasi memanfaatkan perangkat lunak yang dirancang secara sistematis untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan spesifik pengguna.

Lebih lanjut, menurut Nugroho (2020:15), pemanfaatan aplikasi merupakan salah satu bentuk adaptasi teknologi informasi yang bertujuan untuk menyederhanakan proses kerja, mengurangi kesalahan manual, dan menyediakan data yang lebih terstruktur. Dengan aplikasi, pengguna dapat mengakses informasi secara *real-time*, berkolaborasi dengan lebih mudah, serta meningkatkan pengambilan keputusan yang berbasis data.

Selain itu, Sudaryono (2019:45) menjelaskan bahwa aplikasi tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga sebagai sarana inovasi yang mendukung perubahan dan transformasi di berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan teknologi secara optimal melalui fitur-fitur yang telah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik.

Secara keseluruhan, pemanfaatan aplikasi adalah proses yang melibatkan adaptasi teknologi untuk meningkatkan manfaat dalam berbagai aktivitas. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk bekerja lebih efisien, mengurangi waktu pengerjaan, dan meningkatkan hasil kerja. Dengan demikian, aplikasi menjadi bagian penting dari perkembangan teknologi informasi yang

bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi penggunanya.

7. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah rangkaian terintegrasi dari komponen teknologi, sumber daya manusia, dan proses yang dirancang untuk mengelola data menjadi informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Menurut Laudon dan Laudon (2020:34), sistem informasi mencakup teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung aktivitas organisasi, mulai dari pengumpulan data, pengolahan informasi, hingga distribusi informasi yang dibutuhkan. Komponen utama dalam sistem informasi meliputi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), basis data, jaringan komunikasi, prosedur kerja, dan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam operasionalnya. Sistem ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi melalui pengolahan data yang sistematis dan terstruktur.

Turban et al. (2019:12) menyebutkan bahwa sistem informasi tidak hanya bertujuan untuk mempermudah alur kerja dalam organisasi, tetapi juga memberikan nilai strategis melalui informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Dalam operasionalnya, sistem informasi melibatkan tiga proses utama, yaitu input, yang bertugas untuk mengumpulkan dan memasukkan data mentah; proses, yang mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan; dan output, yang menghasilkan informasi yang dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ada elemen *feedback* (umpan balik) yang memungkinkan sistem untuk terus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Jogiyanto (2018:21) menekankan bahwa di era modern, sistem informasi telah berevolusi dari sekadar alat administratif menjadi solusi strategis yang mampu menghadapi dinamika bisnis dan lingkungan eksternal. Integrasi teknologi terkini, seperti

big data, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan Internet of Things (IoT), membuat sistem informasi semakin canggih dalam memproses data yang kompleks menjadi informasi yang bernilai tinggi. Sebagai contoh, analisis data yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat membantu perusahaan memahami pola perilaku pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif.

Sistem informasi juga memainkan peran penting dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan industri. Dalam bidang pendidikan, sistem informasi digunakan untuk manajemen data siswa, penjadwalan, hingga pembelajaran berbasis teknologi. Di sektor pemerintahan, sistem informasi mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui layanan publik berbasis elektronik atau *e-government*. Di bidang kesehatan, sistem informasi membantu dalam pengelolaan rekam medis pasien, diagnosa berbasis data, hingga penyediaan informasi kesehatan yang *real-time*.

Dengan demikian, sistem informasi merupakan pilar utama dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, dan peningkatan produktivitas organisasi. Keberhasilan implementasi sistem informasi sangat bergantung pada keselarasan antara kebutuhan organisasi, kapabilitas teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem tersebut. Sebagai solusi teknologi yang terus berkembang, sistem informasi berperan strategis dalam menciptakan daya saing yang berkelanjutan di tengah kompleksitas tantangan era digital.

8. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA)

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) adalah sebuah platform berbasis teknologi yang dirancang untuk mengelola barang milik daerah secara lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

e-SIMBADA merupakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan barang milik daerah mulai dari pencatatan, pengadaan, pemanfaatan, hingga penghapusan, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, pengelolaan barang milik daerah mencakup beberapa aspek, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, pemindah-tanganan, penghapusan, hingga penatausahaan dan pelaporan. Dengan adanya e-SIMBADA, seluruh proses tersebut dapat dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dalam satu sistem yang terpusat.

e-SIMBADA berfungsi sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui pencatatan yang akurat dan *real-time*. Misalnya, data mengenai jumlah, lokasi, kondisi, dan nilai barang milik daerah dapat diakses dengan mudah sehingga meminimalisasi potensi kesalahan atau kehilangan data. Sistem ini juga memungkinkan pelaporan yang lebih cepat dan efisien, baik untuk kebutuhan internal maupun pelaporan kepada pemerintah pusat.

Keunggulan lain dari e-SIMBADA adalah kemampuannya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang daerah. Melalui sistem ini, proses pengadaan hingga penghapusan barang dapat diawasi dengan lebih baik, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan atau pengelolaan aset yang tidak efisien. Selain itu, sistem ini dirancang untuk mendukung perencanaan kebutuhan barang yang lebih tepat sasaran berdasarkan data historis dan prediksi kebutuhan mendatang.

Penerapan e-SIMBADA di lingkungan pemerintah daerah juga memberikan dampak positif pada efisiensi

kerja. Pengelolaan barang yang sebelumnya dilakukan secara manual dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data kini dapat diminimalkan melalui otomatisasi sistem. Data barang milik daerah yang tersimpan secara terpusat dan terintegrasi memungkinkan setiap unit kerja mengakses informasi yang diperlukan tanpa harus melalui proses administratif yang berbelit-belit.

Dengan demikian, e-SIMBADA menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Implementasi sistem ini tidak hanya membantu pemerintah daerah memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku tetapi juga mendorong optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah untuk kepentingan pelayanan publik. Melalui e-SIMBADA, pemerintah daerah dapat menciptakan pengelolaan aset yang lebih efisien, transparan, dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya aspek efektivitas tertentu, sekaligus mendeskripsikan secara terperinci efektivitas tersebut melalui uraian dengan argumen yang jelas.

Menurut Purnomo Adi (2019:130), pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diartikan sebagai pemaparan data menggunakan kata-kata responden apa adanya, sesuai dengan pertanyaan penelitian, dan dianalisis menggunakan kata-kata yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penulis berusaha menggambarkan kondisi dan situasi yang timbul pada objek penelitian sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang jelas mengenai penelitian yang dimaksud, yaitu Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

Penelitian deskriptif biasanya dilakukan tanpa merumuskan hipotesis secara ketat; meskipun menggunakan hipotesis, hasilnya tidak diuji secara statistik. Oleh karena itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk menjabarkan atau menganalisis. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu keadaan (objek), yang melibatkan pencatatan dan analisis secara mendalam.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah efektivitas kinerja Aplikasi e-SIMBADA di Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, yang melibatkan analisis terhadap sejauh mana aplikasi tersebut mampu mendukung pengelolaan barang daerah secara efektif. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Aplikasi e-SIMBADA di lokasi tersebut, seperti ketersediaan sumber daya, dukungan kebijakan, serta kesiapan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Penelitian ini turut membahas prinsip-prinsip pelayanan yang diterapkan melalui Aplikasi e-SIMBADA, terutama dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan barang daerah di Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Semua aspek ini dianalisis secara mendalam untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas pemanfaatan aplikasi tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan objek, menggali informasi, dan mengambil data. Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat pengambilan informasi, wawancara dengan narasumber,

serta pengumpulan data sebagai komponen penelitian terkait adalah Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, yang beralamat di Jalan Raya Dukun No. 04, Gresik. Alasan dipilihnya lokasi ini adalah karena Kantor Kecamatan Dukun merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana Aplikasi e-SIMBADA di Kabupaten Gresik.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Adapun dalam penelitian ini, mendeskripsikan tentang efektivitas pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, yang mengacu pada teori Richard M. Steers (1995:9), dikutip dalam penelitian karya Dicky Setiawan Nugroho (2020:20), dengan beberapa indikator sebagai berikut:

a) Keberhasilan Program

Hasil wawancara dengan Bapak Heru Budi Setiawan, SE, selaku Sekcam di Kecamatan Dukun, adalah sebagai berikut:

“Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) mampu menghasilkan laporan Manajemen Barang Daerah dan segala bukti pendukung yang lebih lengkap dan cepat daripada sistem sebelumnya atau cara manual. Selain itu, pengolahan data transaksi Manajemen Barang Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) menjadi laporan yang dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Tujuan lain dari dibentuknya

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) adalah agar organisasi dapat memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan yang strategis.” (Wawancara pada tanggal 3 Juni 2024).

b) Keberhasilan Sasaran

Hasil wawancara dengan Bapak Sainuri, S.Sos, selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Dukun, adalah sebagai berikut:

“Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) sangat membantu Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dalam mencapai sasarnya untuk menghasilkan laporan Informasi Manajemen Barang Daerah dengan cepat dan akurat.” (Wawancara pada tanggal 3 Juni 2024).

c) Kepuasan terhadap Program

Kepuasan terhadap program sangat menentukan suatu keberhasilan. Merujuk pada teori yang dinyatakan oleh Richard M. Steers, keterangan yang diperoleh dari narasumber membuktikan bahwa tujuan lain dari penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) juga telah tercapai, yakni informasi yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut telah cukup membantu dalam pelaporan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terhadap informan ketiga mengenai apakah e-SIMBADA sudah cukup membantu dalam pelaporan dan memanfaatkan manajemen barang.

Hasil wawancara dengan Ibu Fauziah, S.Kom, dan Ibu Nabilah Maulidiah adalah sebagai berikut:

“Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) telah memberikan fungsi verifikasi pada dokumen

Manajemen Barang Daerah yang telah diproses, sehingga kebenaran dalam dokumen tersebut dapat lebih dipercaya. Format atau konsep pengisian dokumen laporan Manajemen Barang Daerah juga sudah ada di lembar kerja, sehingga kualitas data dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat.” (Wawancara pada tanggal 4 Juni 2024).

d) Tingkat Input dan Output

Berdasarkan tingkat input dan output, peneliti melakukan wawancara dengan operator aplikasi e-SIMBADA, yaitu Bapak Agus Yulianto. Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan tentang persiapan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan e-SIMBADA serta hasil yang telah dicapai.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Yulianto, selaku Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA), adalah sebagai berikut:

“Aplikasi ini memungkinkan pengguna laporan Manajemen Barang Daerah untuk menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan Manajemen Barang Daerah di masa depan, maupun untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pengelolaan Manajemen Barang Daerah di masa kini dan masa lalu. Manfaat prediktif ini didasarkan pada keterangan dari narasumber bahwa informasi pada laporan Manajemen Barang Daerah Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dapat membantu pimpinan dan staf untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil laporan di masa lalu dan kejadian saat ini. Untuk kelengkapannya,

laporan yang dihasilkan oleh aplikasi ini sudah dikelompokkan menurut jenis masing-masing, dengan sistem informasi yang langsung bekerja otomatis setelah data diinput.” (Wawancara pada tanggal 3 Juni 2024).

e) Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh

Pencapaian tujuan yang didapatkan dari pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) dapat dilihat dari pertanyaan peneliti kepada informan pertama mengenai apakah masih ada kekurangan dalam e-SIMBADA dalam mencapai tujuan, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani hal tersebut. Hasil wawancara dengan informan kedua adalah sebagai berikut:

“Kalau kekurangan, ya mungkin hanya pada servernya saja, jika internet mengalami down. Namun, yang jelas pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) sudah dapat menghasilkan output sesuai dengan jumlah yang ditargetkan, baik di bidang Manajemen Barang Daerah maupun pelaporan. Dari segi kualitas, suatu program dilihat dari output yang dihasilkan. Jika output yang dihasilkan tidak sesuai dengan manfaat yang diharapkan, maka kebijakan penggunaan program tersebut tidak akan berjalan dengan baik.” (Wawancara pada tanggal 5 Juni 2024).

2. Faktor Pendukung Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Untuk mengetahui faktor pendukung dalam pelaksanaan efektivitas pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain melakukan studi lapangan dan survei untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Adapun faktor-faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

a) Komunikasi yang Baik

Komunikasi merupakan salah satu faktor keberhasilan pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, di mana komunikasi ini ditujukan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi efektivitas.

b) Sumber Daya Manusia yang Baik

Keahlian dari para pelaksana menjadi salah satu komponen penting sumber daya untuk pemanfaatan kebijakan. Oleh karena itu, jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Dari keterangan yang disampaikan narasumber, peningkatan keahlian pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan Manajemen Barang Daerah melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) dilakukan melalui pelatihan, diskusi yang lebih khusus, serta koordinasi antara pimpinan dan pegawai (staf) Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

c) Sikap Implementor

Faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan isi dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Namun, jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat

kebijakan, maka proses pemanfaatan akan mengalami banyak masalah. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, didukung oleh sikap seluruh pegawai yang menerima dan mampu melaksanakan kebijakan pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) dengan baik dan senang hati selaku implementor kebijakan. Disposisi atau sikap yang baik dari implementor disebabkan oleh pandangan mereka bahwa Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) dapat mempercepat proses pelaporan Manajemen Barang Daerah.

d) Struktur Birokrasi yang Memadai

Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam pemanfaatan kebijakan salah satunya adalah tingkat pengawasan terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan pelaksana. Selain itu, untuk menciptakan sebuah aransemen kebijakan yang ideal, jika tidak didukung oleh nilai-nilai moral dan kapasitas pejabat yang baik, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan bermanfaat.

3. Faktor Penghambat Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Berikut adalah uraian faktor penghambat efektivitas pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik:

a) Masalah Software dan Jaringan

Salah satu faktor penghambat efektivitas pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun

adalah masalah terkait software dan jaringan. Terkadang, aplikasi mengalami kendala teknis seperti bug atau kesalahan sistem yang menyebabkan proses pengolahan data menjadi terhambat. Selain itu, masalah koneksi jaringan yang tidak stabil juga menjadi hambatan dalam mengakses aplikasi, mengingat penggunaan aplikasi ini membutuhkan koneksi internet yang lancar untuk memastikan data dapat diinput dan diproses dengan baik.

b) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat lain yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan e-SIMBADA adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional aplikasi. Misalnya, fasilitas komputer yang kurang memadai atau perangkat keras yang sudah usang dapat memperlambat kinerja aplikasi. Hal ini berpengaruh pada kelancaran proses pengolahan data dan laporan yang dihasilkan, sehingga tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.

c) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Efektivitas pemanfaatan Aplikasi e-SIMBADA juga terganggu oleh kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih dalam menggunakan aplikasi tersebut. Pengelola dan operator aplikasi membutuhkan keterampilan teknis dan pemahaman yang baik tentang pengoperasian sistem. Jika tidak ada pelatihan yang memadai atau jika staf tidak memiliki kompetensi yang cukup, maka proses pemanfaatan aplikasi akan terganggu, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitasnya.

d) Kurangnya Komitmen Pimpinan dan Karyawan

Faktor lainnya yang dapat menghambat efektivitas pemanfaatan e-SIMBADA adalah kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan. Tanpa adanya dukungan penuh dari pimpinan, implementasi aplikasi mungkin akan

berjalan lambat atau bahkan terhambat. Selain itu, apabila karyawan tidak memiliki kesadaran dan komitmen untuk memanfaatkan aplikasi dengan baik, mereka akan lebih cenderung menggunakan metode manual atau kurang optimal dalam mengoperasikan aplikasi, sehingga mengurangi efektivitas penggunaan sistem tersebut.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas aplikasi (e-SIMBADA) dalam penyusunan laporan di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Penerapan aplikasi (e-SIMBADA) dalam penyusunan laporan di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dapat dinyatakan cukup efektif, meskipun terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat dalam penerapan aplikasi (e-SIMBADA). Hal ini ditandai dengan terpenuhinya kriteria yang mengacu pada teori efektivitas dari Richard M. Steers dalam penerapan aplikasi (e-SIMBADA), baik dari aspek keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, dan pencapaian tujuan secara menyeluruh.

b) Faktor pendukung efektivitas penerapan aplikasi (e-SIMBADA) dalam penyusunan laporan di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, yaitu komunikasi yang baik, sumber daya manusia yang baik, sikap implementor, dan struktur birokrasi yang memadai. Sedangkan faktor penghambat efektivitas penerapan aplikasi (e-SIMBADA) dalam penyusunan laporan di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, antara lain adalah kendala software dan jaringan, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia, serta komitmen pimpinan dan pegawai.

2. Rekomendasi

Dengan ditemukannya beberapa kekurangan dalam proses pemanfaatan aplikasi (e-SIMBADA), kiranya perlu dilakukan pembenahan dan langkah-langkah penyempurnaan tindakan sehingga dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Dengan demikian, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Untuk mengatasi kendala pada software dan jaringan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, harus melakukan pengadaan perangkat penunjang berupa sistem backup data untuk meminimalkan risiko data loss yang biasa terjadi karena penurunan performa hard disk atau disk pada server.
- b) Dalam mengatasi kendala pada hardware sistem, perlu adanya perhatian dari pimpinan untuk menganggarkan pemeliharaan (maintenance) pada komputer dan perangkat aplikasi (e-SIMBADA) lainnya yang ada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Untuk mengatasi kendala sumber daya manusia, perlu adanya perhatian dari pimpinan untuk menganggarkan program-program pelatihan aplikasi (e-SIMBADA) secara berkala bagi para pegawai atau staf bidang, mengingat masih adanya kesenjangan digital (digital divide) pada pegawai atau staf bidang dalam pengoperasian aplikasi (e-SIMBADA).
- c) Untuk mengatasi kendala kurangnya komitmen pimpinan, perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kualitas penerapan aplikasi (e-SIMBADA) di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menyuarakan keluhan-keluhan dan saran pengembangan dalam rapat atau diskusi langsung dengan pimpinan.

REFERENSI

Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ni'matul, H. (2009). *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Febria, P. D., Yasril, Y., & Nora, E. P. (2018). Efektivitas Penerapan Aplikasi APLIKASI SIMBADA di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1–18.

Hardjanto, K., Margaretha K. P., & Murjoko. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Aplikasi e-SIMBADA) Berbasis Akrual pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. *Jurnal Teknik Informatika*, 12(1), 11–20.

Hertanto, Y., Tjahjanulin, D., & Amin, F. (2016). Sistem Informasi Manajemen Daerah (Aplikasi e-SIMBADA) Terhadap Efektivitas Pelaporan (Studi pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah di Kabupaten Blitar). *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 15–24.

Hidayat, W. W. (2020). *Dasar-Dasar Analisa Laporan*. Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.

Khaerullah, Hafiz E. P., & Nurbiah, T. (2023). Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang dan Kekayaan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar Administrasi Negara*, 2(1), 44–67.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.

Pulungan, M. S. (2014). Optimalisasi Aplikasi (e-SIMBADA) dalam Mewujudkan Pengelolaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

- yang Lebih Berkualitas. *Jurnal Bina Praja*, 6(4), 269–282.
- Reinanda, B., Nenden, M. C. P., & Rafles, G. (2023). Seberapa Efektifkah Simbada Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Pontianak. *Jurnal Untan*, 1(1), 1–12.
- Saleh, H. R. (2015). Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Kualitas Informasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Aplikasi (SIMBADA) Pada Pemerintah Kota Kendari. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Setiaji, W. A. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada RS. PKU Muhammadiyah Surakarta). *Thesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Shabrina, K. N. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pementahan Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1), 121–138.

